

IMPLEMENTASI PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN SUB SEKTOR PADI PADA GAPOKTAN MUKTI JAYA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

Fikri Fani Ahmadi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
fikrifani18@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Program Intensifikasi Pertanian adalah suatu usaha guna meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga menetapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang ditinjau berdasarkan teori Implementasi Menurut Van Meter Van Horn adalah Mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakant, sumberdaya, disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan kembangbahu Kabupaten Lamongan diimplementasikan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Desa Sidomukti, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, Ketua GAPOKTAN, dan anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan intensifikasi pertanian, misalnya pembentukan kooperasi GAPOKTAN, penyuluhan pertanian, penggunaan teknologi pertanian, bantuan pupuk dan benih bersubsidi dan membangun kemitraan untuk penyaluran hasil panen. Dapat disimpulkan bahwa implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, belum dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran program hal ini dapat dilihat dari tidak ada peningkatan produktivitas panen padi dari tahun 2016 ke 2017, hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, misalnya kurangnya bantuan pupuk dan benih bersusidi, kurangnya koordinasi antara pelaksana dan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan minimnya teknologi pertanian. agar program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti berjalan dengan baik dan mampu mencapai ukuran dan tujuan kebijakn pelaksana harus lebih meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan mencukupi kebutuhan benih dan pupuk bersubsidi dan pemenuhan teknologi pertanian.

Kata Kunci : Implementasi, Program Intensifikasi Pertanian, GAPOKTAN

Abstract

Agricultural Intensification Program is an effort to increase agricultural productivity by utilizing the existing agricultural land as well as possible, which aims to improve agricultural output and also establish food security in Lamongan regency. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research is the Implementation of Agricultural Intensification Program at Gapoktan Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Subdistrict of Lamongan Regency based on Implementation theory According to Van Horn Van Meter is to identify the size and purpose of policy, resources, disposition, characteristics of implementing agent, communication and social environment, economy and politics. Data collection techniques through observation, interview and documentation. The results of the implementation of agricultural intensification program of rice sub-sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Sub-district of Lamongan District is implemented with the network of actors involved namely Sidomukti Village Government, UPT Agriculture Department Kembangbahu Subdistrict, Chairman GAPOKTAN, and members of GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village. the implementation of the policy is demonstrated by agricultural intensification activities, such as

the establishment of GAPOKTAN cooperation, agricultural extension, the use of agricultural technology, fertilizer and subsidized seeds and establishing partnerships for harvesting. It can be concluded that the implementation of agriculture intensification program of paddy sub-sector at GapokTAN Mukti Jaya Sidomukti Village, not yet able to walk according to program objectives and targets this can be seen from no increase productivity of rice harvest from 2016 to 2017, this is because there are still some obstacles faced, such as lack of fertilizers and seedlings, lack of coordination between implementers and target groups, lack of socialization, and lack of agricultural technology. so that intensification program of agriculture of paddy sub sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village run well and able to reach the measure and purpose of policy of implementer should improve coordination, socialization and fulfill requirement of subsidized seed and fertilizer and fulfillment of agricultural technology.

Keywords: Implementation, Agricultural Intensification program, GAPOKTAN.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor potensial yang dimiliki bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian. Di karenakan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian. Tetapi dalam pengelolaan dan sistem yang ada pada sektor pertanian menunjukkan masih adanya masalah didalamnya. Salah satu masalah utama dalam pertanian di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Rata rata pendapatan perkapita di sektor pertanian sangat jauh dibawah rata rata pendapatan di sektor lain, khususnya sektor perindustrian dan jasa. Oleh sebab itu, pertanian belum menjadi sektor usaha yang menarik untuk ditekuni.

Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya “rawan pangan” dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk untuk berbagai jenis tanaman pangan, akibatnya indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi.

Terkait hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas panen padi di Indonesia adalah melalui program intensifikasi pertanian, dengan begitu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 56/PERMENTAN /RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, maka diberbagai daerah di indonesia membuat program intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktifitas hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pangan yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Intensifikasi pertanian adalah program pemerintah untuk meningkatkan produktifitas panen di indonesia melalui pengelolaan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian. Untuk menunjang program intensifikasi pertanian antara lain, yang pertama dibentuknya

GAPOKTAN (Gabungan kelompok tani), dalam kelompok usaha tani tersebut terdapat koperasi yang bertujuan memberikan dana simpan pinjam kepada anggota, dan sebagai wadah program intensifikasi pertanian, kedua penggunaan teknologi pertanian, jadi pemerintah memberikan fasilitas berupa mesin traktor, mesin untuk bertanam, dan mesin untuk panen, ketiga memberikan penyuluhan tentang teknik bercocok tanam yang benar, keempat memberikan subsidi pupuk bagi anggota kelompok tani, kelima pemberian bibit unggul, keenam membangun kemitraan untuk penyaluran hasil panen.

Tujuan intensifikasi pertanian adalah mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, tersusunya rencana area tanam dan perkiraan produksi intensifikasi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan komoditas unggulan serta pendapatan usaha tani masing – masing, dan terwujudnya rumusan kebijakan dan langkah operasional dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian.

Salah satu daerah yang menerapkan program intensifikasi pertanian, Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian yang memiliki daerah irigasi yang cukup luas yaitu rawa dan waduk yang terletak di 27 kecamatan. Menurut data yang diambil dari BPS Kabupaten Lamongan tahun 2015 jumlah lahan pertanian sawah di Kabupaten Lamongan adalah 151.727 hektar atau sekitar 84, 28 persen dari total luas lahan Kabupaten Lamongan. Data ini menunjukkan betapa agrarisnya wilayah di kabupaten Lamongan. Melimpahnya persawahan yang menjadi potensi unggulan desa perlu ditingkatkan ke arah yang lebih jelas dengan potensi tersebut kabupaten Lamongan sangat cocok untuk menerapkan program intensifikasi pertanian.

produktifitas hasil panen di Kabupaten Lamongan khususnya sektor tanaman padi masih rendah dan kurang merata, hal itu dapat dilihat dari data BPS kabupaten Lamongan, pendapatan perkapita petani dan buru tani perbulan dibawah garis kemiskinan 176.920 Jiwa (14,89 %) tahun 2016 lebih tinggi dengan rata-rata penduduk di Provinsi Jawa Timr (12,05 %). dikarenakan masih adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh petani yang ada di Kabupeten Lamongan, terkait dengan hal tersebut, menuntut adanya perbaikan yang dilakukan,

dengan harapan untuk menjadikan sektor pertanian yang berpeluang besar. Oleh karena itu dengan berpedoman Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017 maka pemerintah Kabupaten Lamongan membuat berbagai program untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian di Kabupaten Lamongan, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen padi, sehingga dapat mensejahterakan petani yang ada di Lamongan. Program Intensifikasi Pertanian diciptakan sebagai inovasi Kebijakan dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan produktifitas panen petani di Kabupaten Lamongan.

Kecamatan Kembangbahu merupakan salah satu penghasil padi terbesar di kabupaten Lamongan yang mencapai 74 Ton/ hektar. Pertanian di kecamatan Kembangbahu membawa peran penting bagi kelangsungan hidup masyarakat juga sebagai sumber ekonomi. Tahun 2015 lahan pertanian di Kecamatan Kembangbahu cukup luas bila dibandingkan dengan lahan non pertanian yaitu sebesar 55% dengan luas 3.777,43 Ha sedangkan luas lahan non pertanian sebesar 45% dengan luas 3.065,14 Ha.

Upaya meningkatkan hasil pertanian di Kecamatan Kembangbahu, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah kualitas petani. Kualitas petani dapat ditingkatkan dengan memberikan bekal pelatihan serta pengetahuan mengenai tata cara menanam yang baik melalui wadah yang dinamakan Poktan (Kelompok Tani) yang tersebar di setiap desa. Data pertanian di Kecamatan Kembangbahu menunjukkan bahwa ada 89 kelompok tani yang sudah terdaftar di UPT Kecamatan Kembangbahu.

Namun, selama Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN (Gabungan kelompok tani) Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berjalan mulai dari 2013, masih belum membuahkan hasil yang optimal hal ini dapat dilihat dari table produktifitas panen padi dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel produktivitas panen padi di Desa Sidomukti

No	Tahun	Produktivitas Ton/ Ha
1	2015	6.53
2	2016	6.53
3	2017	6.53

Table diatas menunjukkan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak ada peningkatan produktivitas pada hasil panen padi di Desa Sidomukti, dikarenakan masih banyak ditemukan berbagai masalah dalam

program intensifikasi pertanian seperti minimnya teknologi pertanian, karena setiap GAPOKTAN hanya di beri bantuan 1 traktor. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanto selaku anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Selengkapnya berikut disampaikan hasil wawancara :

“program intensifikasi pertanian, program yang memberikan fasilitas teknologi pertanian, penyuluhan oleh dinas pertanian, dan juga memberikan subsidi pupuk dan benih, tetapi untuk teknologi pertanian masih sangat minim, karena setiap GAPOKTAN hanya di beri bantuan 1 traktor, dan untuk teknologi lain masih seaneh dan hal itu sangat memberatkan petani disini” (wawancara dilakukan pada 28 Desember 2017)

Menurut Bapak Yanto selaku anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Selengkapnya berikut disampaikan hasil wawancara :

“Saya kurang tahu tentang program intensifikasi pertanian,, yang saya tahu pemerintah memberikan fasilitas teknologi pertanian, penyuluhan oleh dinas pertanian, dan juga memberikan subsidi pupuk dan benih”(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 april 2018.)

Selain itu permasalahan lain adalah kurangnya koordinasi antara UPT Dinas Petanian di Kecamatan Kembangbahu dengan GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, sehingga GAPOKTAN yang seharusnya sebagai wadah program intensifikasi pertanian, dalam praktennya hanya sebagai penyalur bantuan pupuk dan benih bersubsidi hal ini di ungkapakan oleh Bapak Yanoer selaku penanggung jawab program Intensifikasi Pertanian sebagai berikut :

“kurangnya koordinasi antara UPT Dinas Petanian di Kecamatan Kembangbahu dengan GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, sehingga GAPOKTAN yang seharusnya sebagai wadah program intensifikasi pertanian, dalam praktennya hanya sebagai penyalur bantuan pupuk dan benih bersubsidi.” (wawancara dilakukan pada 4, Januari 2018)

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai Implementasi Intensifikasi Pertanian Sub Sektor Padi Pada GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, disposisi implementor, karakteristik agen pelaksana, komunikasi serta lingkungan social, ekonomi dan politis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor Padi Pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten

Lamongan, dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis manajemen strategi Program Layanan Internet Anak-Anak Desa Tepian Hutan (Literasi Hutan) dengan menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen untuk mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun terhadap program tersebut. Teori proses manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen ini mencakup empat variabel, antara lain pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Dan berikut ini penjelasannya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi aspek yang pertama yang harus diketahui, karena jika ukuran dan tujuan kebijakan tidak diketahui oleh para implementator kebijakan, maka nantinya program tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasan kebijakan tersebut dibuat. Adapun tujuan dari program Intensifikasi Pertanian adalah untuk meningkatkan produktifitas hasil panen di Kabupaten Lamongan guna menetapkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani di Kabupaten Lamongan.

Sementara itu ukuran keberhasilan program Intensifikasi Pertanian adalah dengan ditunjukkannya respon baik dari masyarakat terutama para anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Sikap positif ini muncul karena mengetahui bahwa dengan dilakukannya program Intensifikasi Pertanian akan membantu petani untuk meningkatkan produktifitas panen padi mereka, hal ini juga berpengaruh dalam keberhasilan ini, faktanya dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti belum memenuhi ukuran keberhasilan hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peningkatan produktifitas panen padi dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam Program Intensifikasi Pertanian ini terdapat sasaran yang harus ditujuh. Sasaran dari Program Intensifikasi Pertanian adalah GAPOKTAN

(kelompok tani). Program Intensifikasi Pertanian sendiri sudah sesuai dengan kelompok sasaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil temuan lapangan dimana hasil panen petani meningkat dari tahun ke tahun.

2. Sumber Daya

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menetuka suatu keberhasilan dalam proses implementasi. Manusia merupakan faktor yang menjalankan sebuah program atau kebijakan publik. Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya yang tersedia. Jika sumber daya manusia tidak sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan maka kinerja kebijakan publik tersebut tidak bisa diharapkan.

Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, apartur Desa Sidomukti. Dalam program intensifikasi pertanian di Desa Sidomukti ini para pelaksana program sudah ditempatkan dan difungsikan pada tugasnya masing-masing.

Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berkaitan dengan alokasi dana. Ketika sumber daya manusia yang berkualitas berkompeten telah tersedia tetapi dana dalam anggaran tidak tersedia maka akan menjadi persoalan untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik. Dalam hal ini sumber daya finansial adalah terkait dana yang digunakan untuk jalannya program Intensifikasi pertanian ini berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Lamongan, seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Lamongan No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017.

Sumber daya yang perlu diperhatikan selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial adalah sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia dan sumber daya finansial mendukung, akan tetapi waktu yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan tidak mencukupi, maka hal ini dapat menjadi bagian dari ketidakberhasilan kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 sumber daya waktu yang diteliti yaitu waktu penyalura benih dan pupuk bersubsidi, serta waktu penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu. Mengenai waktu penyaluran pupuk

dilakukan 1 bulan sekali dan tercantum di RDKK (Rencana Definintif Kebutuhan Kelompok) dan ditentukan oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, sedangkan untuk penyaluran benih dilakukan ketika menjelang musim tanam. Untuk penyuluhan pertanian dilakukan oleh petugas Upt Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu dilakukan kondisional. Dikarenakan terkendala jam ke sawah yang berbeda beda antar petani, sehingga jadwal yang disusun oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu tidak dapat berjalan sesuai jadwal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan. Banda pelaksana disini meliputi instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan program. Agustini (2008;14) menyatakan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam implementasi kebijakan. Sehubungan dengan pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian melibatkan beberapa agen pelaksana seperti Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu sebagai pelaksana program, dan pegawai aparatur Desa Sidomukti.

Karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan adalah sikap gigih, tanggap, bertanggungjawab dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kegigihan pelaksana tercermin melalui tekad yang kuat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan program.

Kepala Desa merupakan pihak yang memberikan persetujuan program intensifikasi pertanian yang diajukan oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pertanian di Desa Sidomukti.

UPT Dinas Pertanian menjalankan tugas sebagai pelaksana kegiatan intensifikasi pertanian di kecamatan kembangbahu, khususnya di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Pemerintah Desa Sidomukti juga sangat mendukung Program Intensifikasi Pertanian di Desa Sidomukti. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan fasilitas yang diberikan ketika ada kegiatan intensifikasi pertanian di Desa Sidomukti.

4. Disposisi Implementer

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik., khususnya Implementasi Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Selain itu kondisi pemahaman implementator terhadap kebijakan serta intensitas disposisi implementator juga memengaruhi keberlangsungan implementasi program.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Dukungan dan respon yang positif inilah yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Para pelaksana tersebut sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan para petugas pelaksana program Intensifikasi Pertanian juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

5. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Donald S Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah adanya komunikasi yang terjalin antar organisasi. Komunikasi yang terbangun tentunya akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik maka tugas dan kewajiban mereka dapat berjalan dengan baik pula dan para implementator akan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan masyarakat, begitu juga sebaliknya ketika komunikasi tidak dilakukan dengan baik. Implementasi program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan memerlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini adalah pembahasan mengenai indikator dalam koordinasi yaitu, koordinasi dan komunikasi:

Seorang implementator perlu melakukan koordinasi dengan anggota di bawahnya. Tujuan adanya koordinasi ini adalah untuk pembagian tugas, penyebaran informasi, dan menjalankan kerja sama sehingga para pelaksana mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian koordinasi sangat diperlukan karena dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak sehingga perlu adanya informasi yang jelas, komunikasi yang tepat, dan pembagian tugas

yang sesuai. Koordinasi dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan oleh beberapa pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan Aparatur Desa Sidomukti. Pada praktiknya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan memberikan wewenang penuh kepada UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana program. Selain itu Dinas Pertanian kecamatan Kembangbahu melakukan koordinasi dengan aparaturnya Desa Sidomukti terkait pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian di Desa Sidomukti.

Komunikasi pada penelitian ini adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementator kepada anggota pelaksana. Komunikasi yang baik merupakan faktor keberhasilan sebuah implementasi, karena dengan komunikasi yang baik, pelaksana program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti akan mampu mencapai tujuannya. Melalui hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan berbagai masalah yakni sosialisasi program intensifikasi pertanian di Desa Sidomukti sangat kurang, misalnya saja untuk penyediaan teknologi pertanian, banyak petani yang belum tahu dan kebanyakan mereka menyewa pihak swasta, selain itu ketika penyuluhan juga hanya diberi tahu teknik tanam saja. Sehingga banyak dari petani yang belum mengetahui isi dari program intensifikasi pertanian.

6. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang mendukung implementasi program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik termasuk lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan implementasi yang dilakukan. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadikan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Lingkungan Sosial sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu program, jika para lingkungan sosial tidak sesuai dengan jalannya program maka tentu akan menimbulkan hambatan dalam menjalankan suatu program. Dalam Program Intensifikasi Pertanian ini, lingkungan sosial Desa

Sidomukti masih sangat kental dan menghargai dengan budaya lokal, sehingga banyak petani yang belum terlalu percaya metode pertanian dengan menggunakan teknologi, dan lebih percaya dengan metode konvensional yang sudah mereka terapkan sejak lama.

Kondisi ekonomi pada pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, adalah terkait dengan keadaan ekonomi pada anggota GAPOKTAN yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lingkungan ekonomi sangat menghambat jalannya program Intensifikasi Pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, diakibatkan kebanyakan masyarakat disini bekerja sebagai petani dan buruh tani sehingga ketika dianjurkan menggunakan teknologi banyak dari mereka yang tidak mampu menyewanya, ketika ada yang menyewa pun mereka menyewa secara bersama-sama tidak 1 orang saja.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, unsur politik dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti adalah adanya dukungan dari Bupati Lamongan dengan membuat Peraturan Bupati Lamongan No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017. Dikarenakan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun semakin berkurang seiring pembangunan pabrik yang semakin banyak di kabupaten Lamongan, dukungan juga diberikan oleh Kepala Desa Sidomukti. Dukungan yang diberikan Kepala Desa adalah pemberian fasilitas berupa tempat ketika ada penyuluhan dari Upt Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu. Selain itu adanya dukungan juga diberikan oleh pemerintah Desa Sidomukti dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Sidomukti bekerja sebagai petani, hal itu dapat dilihat dari dukungan pemerintah Desa terhadap program ini, berupa membantu penyaluran pupuk dan benih bersubsidi dan pemberian fasilitas ketika ada penyuluhan pertanian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor Pada Pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana

implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasan kebijakan tersebut dibuat. Adapun tujuan dari program Intensifikasi Pertanian adalah untuk meningkatkan produktifitas hasil panen di Kabupaten Lamongan guna menetapkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani di Kabupaten Lamongan Sementara itu ukuran keberhasilan program Intensifikasi Pertanian adalah dengan ditunjukkannya respon baik dari masyarakat terutama para anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Sikap positif ini muncul karena mengetahui bahwa dengan dilakukannya program Intensifikasi Pertanian akan membantu petani untuk meningkatkan produktifitas panen padi mereka, hal ini juga berpengaruh dalam keberhasilan

Sumber daya elmen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan publik hal yang menjadi sangat krusial adalah sumber daya. Adapun sumber daya yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Keberhasilan implementasi memerlukan ketiga sumber daya tersebut. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, apartur Desa Sidomukti. Dalam program intensifikasi pertanian di Desa Sidomukti ini para pelaksana program sudah ditempatkan dan difungsikan pada tugasnya masing-masing..

Sumber daya waktu terdapat 2 hal yakni waktu penyaluran pupuk dan benih bersusidi dan waktu penyuluhan, Mengenai waktu penyaluran pupuk dilakukan 1 bulan sekali berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang ditetapkan UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, sedangkan untuk penyaluran benih dilakukan ketika menjelang musim tanam. Untuk penyuluhan pertanian dilakukan oleh petugas UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu dilakukan kondisional. Dikarenakan terkendala jam ke sawah yang berbeda beda antar petani, sehingga jadwal yang disusun oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu tidak dapat berjalan sesuai jadwal.

Karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan adalah sikap gigih, tanggap, bertanggungjawab dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kegigihan pelaksana tercermin melalui tekad yang kuat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan program.

Disposisi Implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. Dukungan dan respon yang positif inilah yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Para pelaksana tersebut sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan para petugas pelaksana program Intensifikasi Pertanian juga sudah

ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Komunikasi antar organisasi terdapat 2 indikator yakni koordinasi dan komunikasi, Koordinasi dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan oleh beberapa pihak Dinas Tanaman Pangan, Holikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan Aparatur Desa Sidomukti. Pada praktiknya Dinas Tanaman Pangan, Hortiikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan memberikan wewenang penuh kepada Upt Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana program. Selain itu Dinas Pertanian kecamatan Kembangbahu melakukan koordinasi dengan aparaturnya Desa Sidomukti terkait pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian di Desa Sidomukti.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor yang mendukung implementasi program Intensifikasi Pertanian pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Lingkungan social Dalam Program Intensifikasi Pertanian ini, lingkungan social Desa Sidomukti masih sangat kental dan menghargai dengan budaya lokal, sehingga banyak petani yang belum terlalu percaya metode pertanian dengan menggunakan teknologi, dan lebih percaya dengan metode konvensional yang sudah mereka terapkan sejak lama. lingkungan ekonomi sangat menghambat jalannya program Intensifikasi Pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, dikarenakan kebanyakan masyarakat disini bekerja sebagai petani dan buruh tani sehingga ketika dianjurkan menggunakan teknologi banyak dari mereka yang tidak mampu menyewanya. unsur politik dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti adalah adanya dukungan dari Kepala Desa Sidomukti. Dukungan yang diberikan Kepala Desa adalah pemberian fasilitas berupa tempat ketika ada penyuluhan dari UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu.

Saran

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi program Intensifikasi Pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, maka diberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi alternatif dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan implementasi program Intensifikasi Pertanian yang akan datang, Adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan dana tambahan supaya dapat sejumlah kebutuhan pupuk dan benih, sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara pihak UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, sehingga jalannya implementasi Prrogram intensifikasi berjalan dengan baik.

3. Lebih meningkatkan sosialisasi program Intensifikasi Pertanian, karena banyak dari petani yang belum mengetahui isi program Intensifikasi Pertanian.
4. UPT Dinas Pertanian harus dapat lebih menyakinkan petani tentang penggunaan teknologi pertanian dapat membantu petani meningkatkan produktifitas panen mereka.
5. Lebih mensosialisasikan penggunaan teknologi pertanian.
6. UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu harus lebih aktif lagi daalam menjalankan program Intensifikasi pertanian.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
- b. Tjitjik Rahaju S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing.
- c. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. dan Badrudin Kurniawan, SAP., M.AP selaku dosen penguji,
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

A.T. Mosher, Mengerakkan dan Membangun Pertanian, Jakarta : Jayaguna, 1968

Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

[http://www.beraindainovasi.com/meningkatkan-kesejahteraan-petani-dengan-meraih-nilai-tambah/\(diakses pada 26 desember 12017\)](http://www.beraindainovasi.com/meningkatkan-kesejahteraan-petani-dengan-meraih-nilai-tambah/(diakses pada 26 desember 12017))

[http://www.lamongankab.go.id/program-intensifikasi-pertanian-dilamongan/\(diakses pada 26 desember 2017\)](http://www.lamongankab.go.id/program-intensifikasi-pertanian-dilamongan/(diakses pada 26 desember 2017))

[http://pertanian.go.id/peraturan-pemerintah-penggunaan-lahan-pertanian/\(diakses pada 29 desember 2017\)](http://pertanian.go.id/peraturan-pemerintah-penggunaan-lahan-pertanian/(diakses pada 29 desember 2017))

[http://lamongankab.bps.go.id/hasil-panen-padi-dilamongan/\(diakses pada 29 desember 2017\)](http://lamongankab.bps.go.id/hasil-panen-padi-dilamongan/(diakses pada 29 desember 2017))

[http://lamongankab.bps.go.id/hasil-pertanian-dilamongan/\(diakses pada tanggal 29 desember 2017\)](http://lamongankab.bps.go.id/hasil-pertanian-dilamongan/(diakses pada tanggal 29 desember 2017))

[http://bps.go.id/PDB-sektor-lapangan-usaha-diindonesia/\(diakses pada tanggal 29 desember 2017\)](http://bps.go.id/PDB-sektor-lapangan-usaha-diindonesia/(diakses pada tanggal 29 desember 2017))

Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1977), 30.

M. Aniqul Fahmi. 2010. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan Pangan. Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No. 10. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Lukman Offset YPAPI. Wahab, Solihin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan: Membumi. Yogyakarta

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1989) 11

Nursalam. 2010. Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Kupang: Fisip Undana Kupang.

Nugroho, D, Riant, 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 56/ PERMENTAN /RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2005), 14.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 399

Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 114

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Bandung: Graha Ilmu

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu PolitikIndonesia).

Turnomo Raharjo, Menghargai Perbedaan Kultural (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2005), 2.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.